

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Banyak penelitian ekonomi pembangunan yang membahas pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun negara termasuk di Indonesia. Penelitian pertumbuhan ekonomi menarik, terutama membahas antara pertumbuhan daerah yang tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi relatif rendah dimana setiap negara menginginkan pertumbuhan ekonomi yang merata.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, masing-masing daerah melakukan pembangunan daerahnya sendiri yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal dan juga Solihin (2021) dalam pembangunan ekonomi daerah, tujuan pembangunan ekonomi secara umum dapat diberlakukan di setiap daerah yang berbeda guna mencapai pemerataan pembangunan antar daerah yang tercermin melalui percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan dan pengentasan kemiskinan.

Luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau dan kepulauan menyebabkan permasalahan kurangnya pemerataan pembangunan di setiap Provinsi di Indonesia menjadi awal masalah yang timbul sehingga menyebabkan pola pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi menjadi berbeda-beda sehingga, salah satu isu pembangunan ekonomi daerah adalah disparitas atau ketimpangan pembangunan ekonomi daerah yang masih menjadi masalah hal ini dianggap

karena perbedaan potensi antar daerah juga menimbulkan masalah baru karena daya berkembang antara daerah satu dengan daerah tidak sama.



Walaupun Dalam perspektif ekonomi spasial, wajar bila pola pembangunan ekonomi wilayah di Indonesia tidak seragam, dan melahirkan wilayah yang mampu tumbuh cepat sekaligus memunculkan pula wilayah yang relatif tertinggal atau tumbuh lebih lambat dari wilayah lainnya sehingga mengakibatkan ketimpangan ekonomi wilayah di Indonesia. Namun, Bappenas (2013) Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan antar daerah tetap harus diupayakan untuk dikurangi. Hal yang harus dilakukan dalam upaya mengurangi kesenjangan perekonomian antar daerah adalah mengurangi jarak antara daerah terkaya dengan daerah termiskin, melalui upaya khusus untuk mengangkat daerah tertinggal secara signifikan (Solihin, 2021). Ketimpangan regional ini disebabkan karena daerah-daerah yang memiliki Pertumbuhan ekonomi tinggi mempunyai sumber daya alam berlimpah atau merupakan pusat industri, jasa dan perdagangan.

Masalah adanya kesenjangan pembangunan antar daerah. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Badan perencanaan pembangunan nasional menetapkan daerah tertinggal tiap 5 tahun sekali. Penjelasan tentang daerah tertinggal , di Indonesia tertuang pada butir satu pasal 2 peraturan presiden republik Indonesia nomor 131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal berdasarkan kriteria :

1. Perekonomian masyarakat
2. Sumber daya manusia
3. Sarana dan prasarana
4. Kemampuan keuangan daerah



ilitas;dan

eristik daerah

Berikut Provinsi -Provinsi Tertinggal di Indonesia yang memiliki tingkat daerah 3T tertinggi pada tahun 2015-2022 :

**Tabel 1. 1 Klasifikasi Provinsi Tertinggal di Indonesia tahun 2015-2022**

| No | Provinsi            |
|----|---------------------|
| 1  | Sumatera Utara      |
| 2  | Sumatera Barat      |
| 3  | Sumatera Selatan    |
| 4  | Lampung             |
| 5  | Nusa Tenggara Barat |
| 6  | Nusa Tenggara Timur |
| 7  | Sulawesi Tengah     |
| 8  | Maluku              |
| 9  | Maluku Utara        |
| 10 | Papua Barat         |
| 11 | Papua               |

Sumber :Perpres 113 dan 63

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dari tahun 2015 - 2022 beberapa provinsi di Indonesia masih tergolong sebagai provinsi tertinggal. Pengelompokan tersebut berdasarkan butir satu pasal 2 peraturan presiden republik Indonesia nomor 131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal berdasarkan kriteria - kriteria tercantum. Klarifikasi ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antardaerah di Indonesia. Selain faktor endowment yang berbeda dimana output provinsi yang lebih kaya dengan faktor endowment dipastikan akan lebih tinggi dibandingkan provinsi yang lebih langka faktor endowmentnya. Bagi provinsi daerah tertinggal menghadapi berbagai tantangan yang membatasi kemampuan mereka untuk terjadinya konvergensi sehingga mengarah ke divergensi menurut Bappenas (2021) ada empat tantangan utama pembangunan daerah tertinggal



ilitas sumber daya manusia, tingginya angka kemiskinan, terbatasnya tur dan aksesibilitas wilayah dan banyaknya desa tertinggal Baihaqi (2015) a alasan tidak terwujudnya pembangunan yang seimbang bahwa provinsi-

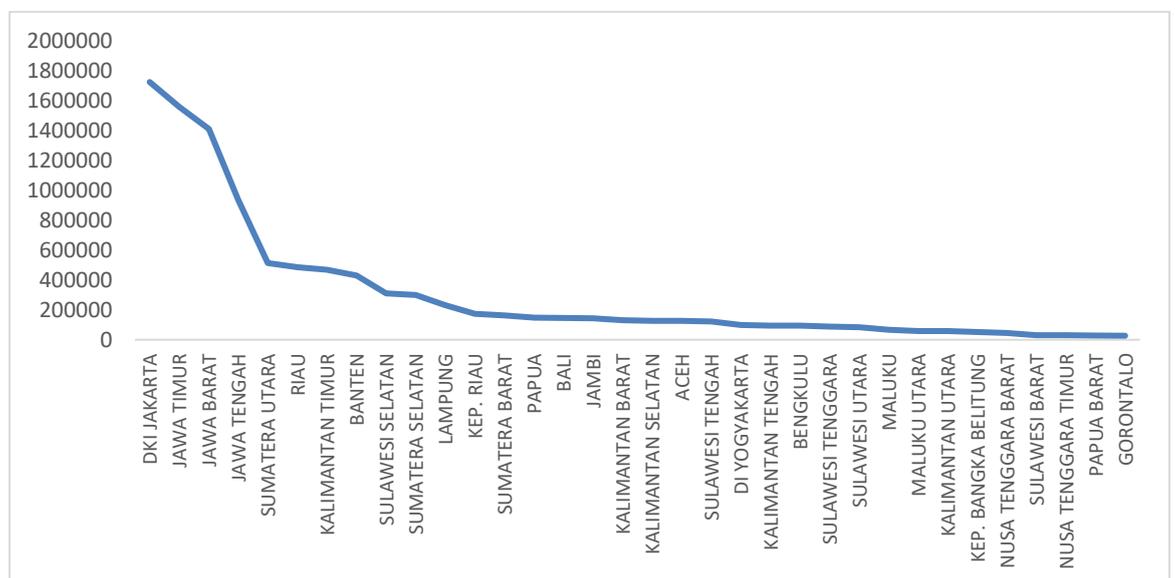
provinsi maju di Indonesia memiliki infrastruktur , kualitas sumber daya manusia dan aksesibilitas terhadap pasar relative lebih baik.dan juga tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi geografis, mobilitas barang dan jasa serta human capital dan ketersediaan infrastruktur

Chen (2020) kegiatan ekonomi wilayah tidak terdistribusi secara merata dikarenakan beberapa wilayah merupakan pusat inti yang memiliki kepadatan yang lebih tinggi, sedangkan wilayah lain berada dipinggiran sekitarnya sehingga situasi tersebut memunculkan ketimpangan. Tidak jarang adanya perbedaan perekonomian setiap daerah menyebabkan daerah kaya atau daerah ekonomi tinggi semakin kaya dan daerah miskin atau daerah ekonomi rendah semakin miskin karena tidak dapat mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi daerah lain yang sudah tinggi. Tetapi Barro (2016) akan ada kondisi dimana perekonomian daerah miskin dengan pendapatan yang rendah akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan negara atau daerah kaya dengan pendapatan yang tinggi dan juga Sholihin (2021) kenyataannya tidak mungkin suatu negara mencapai pembangunan yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi biasanya menyebar secara bertahap dari satu atau lebih 'pusat pertumbuhan' ke sektor atau wilayah lain. Oleh karena itu, pertumbuhan tidak muncul di semua tempat, tetapi muncul pertama kali pada beberapa titik pertumbuhan dan Struktur perekonomian pada suatu wilayah menjadi faktor fundamental yang mempengaruhi kinerja perekonomian diwilayah tersebut sehingga perbedaan struktur perekonomian antar daerah akan menghasilkan perbedaan pada pencapaian pembangunan

asilkan (Tajerin, 2017).



Meskipun identifikasi awal menunjukkan adanya peluang konvergensi, banyak provinsi yang secara teoritis memiliki potensi konvergensi tetapi pada praktiknya tidak mampu mengatasi hambatan dan mengelola potensi sumberdaya yang ada dalam jangka panjang sehingga mengarah terjadinya divergensi. kenyataan ini menisyaratkan perlunya perlakuan khusus bagi provinsi-provinsi yang relatif tertinggal untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, terlihat pada perkembangan laju PDRB 34 provinsi dibawah ini :



**Gambar 1.1 Perkembangan PDRB nasional, 2015-2022**

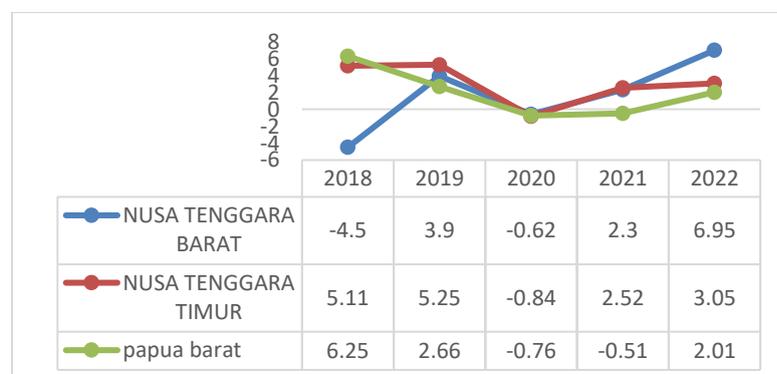
Perkembangan PDRB yang lebih tinggi pada periode 2015-2022 pada Gambar 1.1 diatas terlihat diperoleh beberapa provinsi-provinsi tertinggal hal ini mengindikasikan telah terjadi konvergensi dalam hal pertumbuhan ekonomi provinsi tertinggal terhadap provinsi maju. Seperti di periode 2015-2022 terlihat Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera barat dan Papua memiliki perkembangan PDRB tinggi dibanding Provinsi maju. Namun, beberapa provinsi

menunjukkan pola yang divergensi yang Dimana pada tahun 2015-2022 Nusa Tenggara Barat sebesar 44354.2375 Nusa Tenggara Timur dengan perkembangan PDRB sebesar 29460.73 dan yang terakhir Provinsi



Papua Barat sebesar Rp. 27224.745 ketiga provinsi tersebut masih memiliki pertumbuhan yang rendah dari provinsi lainnya provinsi tersebut sehingga perekonomian yang divergensi tidak dapat dikesampingkan sehingga masih harus dikembangkan semua potensinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tinggi proses inilah yang disebut dengan proses kearah konvergensi yang masih harus dilaksanakan sehingga menjawab tantangan tersebut diperlukan upaya nyata untuk melakukan percepatan konvergensi daerah, yakni mendorong percepatan konvergensi provinsi tertinggal untuk mengejar capaian provinsi lebih maju.

Rusydi (2024) Konvergensi suatu wilayah dapat disebabkan oleh kemampuan daerah dalam melakukan pengelolaan potensi daerah mereka masing-masing dengan kata lain bagaimana provinsi tertinggal mampu meningkatkan PDRB sehingga dapat tumbuh lebih cepat atau mendekati provinsi maju inilah yang dapat menjadi alasan terjadinya konvergensi namun jika pengelolaan yang tidak optimal maka terciptanya divergensi sehingga perlu dipertanyakan mengapa ketika provinsi tersebut tidak tumbuh lebih cepat. Secara lebih spesifik berikut perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat :



mbar 1.2 Laju pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara



### **Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat tahun 2018-2022**

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat pada Gambar 1.2 memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2018 Nusa Tenggara Barat terjadi penurunan sebesar -4.5 %, tetapi berhasil pulih secara signifikan pada tahun 2022 sebesar 6.95% . Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil yang dimana pada tahun 2018 sebesar 5.11% dan pada tahun 2019 sebesar 5.25% meskipun sempat mengalami penurunan sebesar -0.84 % ditahun 2020 akibat pandemi hingga akhirnya tumbuh kembali di tahun 2022 sebesar 3.05 %. Disisi lain Provinsi Papua Barat memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 6.25 % pada tahun 2018, mengalami perlambatan di tahun 2019 2.66 % hingga ditahun 2022 sebesar 2.01 %.

Secara umum terjadinya divergensi pertumbuhan ekonomi provinsi dapat dikaitkan dengan berbagai perbedaan faktor ekonomi dimana rata-rata provinsi-provinsi maju memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai faktor ekonomi sehingga faktor-faktor ini lebih mendukung pertumbuhan ekonomi di provinsi maju saja, Ketimpangan ini mencerminkan bahwa kebijakan ekonomi belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi disparitas antarprovinsi dan cenderung memperbesar kesenjangan pembangunan Li (2018) fenomena tidak terjadinya konvergensi diperburuk oleh hambatan struktural seperti infrastruktur yang tidak memadai, akses terbatas ke pendidikan. Infrastruktur yang tidak memadai mengurangi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Pada investasi dalam hal ini diinterpretasikan pada nilai PMTB pada 2018-2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengalami peningkatan signifikan 6.334,10 miliar ditahun 2018 meningkat ditahun 2022 sebesar 10.334,10 miliar yang mencerminkan pertumbuhan investasi yang stabil hal



serupa juga pada Provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung meningkat tiap tahunnya pada tahun 2018 sebesar 9.43 miliar menjadi 102.073 miliar ditahun 2022 sementara itu diprovinsi papua barat menunjukkan peningkatan pada tahun 2018 sebesar 2.688 miliar hingga ditahun 2022 mencapai 65.5 miliar yang mencerminkan tantangan dalam mempertahankan investasi atau pengaruh dari dinamika ekonomi local provinsi. temuan Arsyanti (2020) dimana variabel PMTB berpengaruh positif dikarenakan kegiatan investasi akan menambah stok modal yang selanjutnya akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi berlawanan hasil dengan temuan Bayar (2014) dalam penelitiannya tidak semua bentuk investasi berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini dikarenakan efisiensi investasi itu sendiri.

Selain penguatan faktor infrastruktur dan investasi tak kalah pentingnya yaitu sumber daya manusia, salah satunya berperan sebagai tenaga kerja yang di interpetasikan tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK).TPAK mencerminkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi berbicara mengenai tenaga kerja apabila jumlah tenaga kerja yang semakin banyak maka untuk memproduksi barang dan jasa disuatu perekonomian keadaan tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK).

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat Dan Papua Barat pada periode 2018-2022 menunjukkan tren peningkatan dengan dinamika yang berbeda . Nusa Tenggara Timur terjadi penurunan di tahun 2019 tetapi terus meningkat hingga 2022, mencapai 75.23 yang mengindikasikan peningkatan keterlibatan kerja, pada provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengalami kenaikan stabil dari ada tahun 2018 menjadi 70,93 pada 2022, yang mencerminkan ihan partisipasi Angkatan kerja yang cukup kuat. Sementara itu, Papua



Barat menunjukkan kenaikan yang lebih lambat dari 67,3 pada tahun 2018 menjadi 67,71 pada tahun 2022, secara keseluruhan tren ini mencerminkan perbaikan dalam keterlibatan tenaga kerja di wilayah tersebut hal ini sejalan dengan penelitian ditemukan oleh Irawan (2024) efek positif dari tingkat partisipasi Angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi di Indonesia namun, hasil berbeda dalam penelitian Taha (2023) di beberapa negara Arab, tidak ada hubungan signifikan antara partisipasi angkatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Berbeda dengan variabel lainnya Indeks Pembangunan Manusia ketiga provinsi tersebut pada periode 2018 -2022 konsisten meningkat tiap tahunnya pada provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 65.44, Nusa Tenggara Barat sebesar 68.66 Dan Papua Barat sebesar 65.21 masih dalam kategori sedang sehingga peningkatan tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan. Elistia (2018) menemukan bahwa IPM memiliki hubungan positif yang kuat dengan produk domestik bruto (PDB) yang menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan Pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat berbeda dengan itu penelitian sebelumnya Irawan (2024) yang dimana IPM tidak berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Bali.

Berdasarkan Fakta ketidakkonsistenan faktor -faktor pertumbuhan ekonomi tersebut apakah Pengeluaran Pemerintah, Investasi, sumber daya manusia dan kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi ketiga provinsi tersebut sehingga menciptakan konvergensi pertumbuhan ekonomi.



arah dengan tingkat pembangunan lebih rendah idealnya mengalami  
 rhan lebih cepat daripada daerah yang lebih maju, dengan adanya

kebijakan dan kondisi yang mendukung (Sakti, 2024).

Divergensi pertumbuhan ekonomi antarwilayah menjadi perhatian penting dalam wacana ekonomi kontemporer. Divergensi terjadi ketika wilayah dengan pendapatan yang awalnya lebih rendah gagal mengejar ketertinggalan dari wilayah yang lebih kaya, yang menyebabkan kesenjangan semakin lebar. Fenomena ini telah diamati dalam berbagai konteks, termasuk Jawa Timur, Indonesia, di mana penelitian terkini menunjukkan tingkat konvergensi yang rendah, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata dan bahkan dapat memperburuk kesenjangan yang ada (Sakti, 2022).

Sehingga Berdasarkan latar belakang, penelitian ini mengkaji pengaruh infrastruktur, investasi, TPAK dan IPM pada tiga provinsi yang divergensi pertumbuhannya maka penelitian ini diberi judul **“FAKTOR PENENTU DIVERGENSI PERTUMBUHAN EKONOMI TIGA PROVINSI DI INDONESIA”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah infrastruktur berpengaruh terhadap divergensi pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat?
2. Apakah investasi berpengaruh terhadap divergensi pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat?



3. Apakah TPAK berpengaruh terhadap divergensi pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat?

4. Apakah IPM berpengaruh terhadap divergensi pertumbuhan ekonomi Provinsi

Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh infrastruktur terhadap divergensi pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat
2. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh investasi terhadap Provinsi divergensi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat
3. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat
4. Mengidentifikasi dan menganalisis kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat?

### 1.4 Kegunaan penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, berupa:

1. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan para pembaca dan menambah pengetahuan dalam bidang ekonomi pembangunan dan perencanaan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan yang dapat mendorong terjadinya konvergensi pertumbuhan ekonomi untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi peneliti berminat untuk meneliti tentang konvergensi pertumbuhan ekonomi Provinsi di Indonesia.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kemajuan ekonomi suatu negara atau daerah dapat dikatakan sebagai keberhasilan dalam melakukan pembangunan, Salah satu indicator kemajuan ekonomi tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Todaro (2020) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output yang diproduksi baik penduduk maupun bukan penduduk dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya menurut Sukirno (2016) pertumbuhan ekonomi sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, ini menunjukkan Karena, pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Sudaryo, 2017). Adisasmita (2018) Pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan dari kemampuan daerah tersebut mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi setiap daerah berbeda — beda sehingga faktor produksi



daerah juga berbeda. Sumber daya alam dan faktor produksi setiap daerah ini mengarah ke Produk Domestik Bruto (PDRB), yaitu jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian

diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu.

Dari beberapa definisi pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh para ahli maka, dapat disimpulkan pengertian pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan barang produksi dan jasa pada periode tertentu yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Purwandari (2017) Tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan ketimpangan pendapatan antarpenduduk. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan nilai total output ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu, struktur ekonomi mengacu pada komposisi sektor-sektor ekonomi

Mankiw (2018) mengatakan pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi makro jangka panjang yang dimana pada setiap periode masyarakat negara akan berusaha meningkatkan kemampuannya untuk menghasilkan barang dan jasa melalui penyediaan dan mobilisasi faktor-faktor produksi, Dengan meningkatkan faktor produksi tersebut diharapkan dapat menambah modal, produksi setiap pekerja atau dengan kata lain akan menambah cadangan devisa.

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat namun juga diharapkan mampu mengikis jurang kesenjangan yang saat ini masih dijumpai baik secara sektoral, regional maupun kesenjangan pada level mikro rumah tangga. Diskusi yang cukup mendalam mengenai isu pembangunan terkini dapat diikuti dalam laporan tahunan pembangunan global yang secara reguler diterbitkan oleh Bank Dunia (The World Bank, 2015).

Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan peningkatan presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan pengeluaran total dari suatu perekonomian terhadap berbagai barang



dan jasa yang baru diproduksi pada suatu saat atau tahun serta pendapatan total yang diterima dari adanya seluruh produksi barang dan jasa tersebut atau secara lebih rinci, PDB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam kurun waktu tertentu.

Mankiw (2018) menyebutkan bahwa untuk mengukur pertumbuhan ekonomi biasanya diukur berdasarkan *product domestic bruto* (PDB). Pertumbuhan PDB merupakan indikator dalam melihat pertumbuhan ekonomi di suatu Negara. Besar kecilnya pertumbuhan ekonomi suatu Negara dipengaruhi oleh kuantitas maupun kualitas sumberdaya yang dimiliki baik sumber daya fisik maupun sumber daya manusia dalam hal ini tingkat pendidikan dan pengembangan (Todaro, 2020).

Proses pertumbuhan ekonomi ini akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat (Todaro, 2020). Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berakibatkan produksi dari jenis jasa maupun barang yang dihasilkan, Setiap wilayah akan berusaha agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi berpacu kepada teori— teori pertumbuhan ekonomi factor yang dapat meningkatkan proses produksi seperti, investasi, modal baik fisik maupun manusia, perdagangan dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang memberikan nilai tambah bagi pendapatan nasional.

### 2.1.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Pengukuran pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari Produk Bruto (PDB) dalam lingkup nasional atau dalam lingkup daerah juga Produk Domestik Bruto Regional (PDRB). PDB atau PDRB



didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut ditunjukkan dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (Todaro, 2020).

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah yang dapat dilihat dari laju PDB/PDRB Indikator Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{pdrbt - pdrbt - 1}{pdrbt - 1} \times 100\%$$

Keterangan:

Yt : pertumbuhan ekonomi periode t

PDRBt : PDRBt periode t

PDRBt-1 : PDRBt-1 periode sebelumnya

Selanjutnya Para ahli ekonomi sejak lama telah menganalisis faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di berbagai negara berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan pada suatu negara adalah kekayaan sumber daya, jumlah dan kualitas tenaga kerja, barang-barang modal yang tersedia, sistem sosial dan tingkat teknologi, dan sikap masyarakat.

### 2.1.3 Teori –Teori Pertumbuhan Ekonomi



Ekonomi Klasik

Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik Menurut Adam Smith, proses

pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua aspek utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Arsyad, 2016). Menurut Smith, unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ada tiga yaitu: a. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Dimana jumlah Sumber Daya Alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian. b. Sumber daya manusia merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Dalam hal ini, Smith memandang tenaga kerja sebagai salah satu input dalam proses produksi dan pembagian kerja (*division of labor*) dan spesialisasi merupakan faktor kunci bagi peningkatan produktifitas tenaga kerja. c. Akumulasi modal, Menurut Smith, stok modal memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Stok modal dapat diidentikan sebagai “dana pembangunan” cepat lambatnya pembangunan ekonomi tergantung pada ketersediaan “dana pembangunan” tersebut. Selain itu, stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat pertumbuhan output. Peranannya sangat sentral dalam pertumbuhan output jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal sesuai dengan “batas maksimum” sumber daya alam dengan kata lain, pertumbuhan output akan melambat jika “daya dukung” sumber daya alam tidak mampu lagi mengimbangi laju kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik (Solow)



Model pertumbuhan Solow menjelaskan bagaimana ekonomi suatu ra tumbuh dan mengapa tingkat pertumbuhannya berbeda –beda tiap

negara. Penggunaan model pertumbuhan Solow dalam mendefinisikan pertumbuhan output dipengaruhi oleh persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja dan kemajuan teknologi (Mankiw, 2018). Schiliro (2017) Teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh Solow-Swan didasarkan pada fungsi produksi agregat, yaitu hubungan antara output agregat dan input dalam produksi. Dalam fungsi tersebut, output dihasilkan oleh input, yaitu kapital (K) dan tenaga kerja (N) (Blanchard, 2017).

$$Y = F (K, N)$$

Artinya nilai dari output nasional atau PDB ditentukan oleh level capital dan level tenaga kerja dan mengasumsikan bahwa fungsi produksi *constant returns to scale* artinya jika faktor produksi digandakan maka nilai output juga akan menjadi dua kali lipat.

Selain asumsi *constant returns to scale* asumsi diminishing marginal product yaitu saat ada penambahan faktor produksi dalam hal ini capital, tenaga kerja maka output juga bertambah tapi penambahannya menjadi mengecil. Setiap saat, stok modal adalah penentu utama output ekonomi, tetapi stok modal dapat berubah seiring waktu dan perubahan tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi. ada dua hal yang mempengaruhi stok modal : investasi dan penyusutan (depresiasi). Investasi adalah pengeluaran untuk pabrik dan peralatan baru dan menyebabkan stok modal meningkat. Penyusutan adalah pemakaian modal lama karena usia dan penggunaannya menyebabkan stok modal turun. sehingga dampak investasi dan depresiasi sebagai berikut:

$$\Delta K = \text{Investment} - \text{Depresiasi}$$



### 3. Teori pertumbuhan endogen

Teori pertumbuhan endogen (*endogenous growth theory*) memiliki perspektif yang lebih luas daripada teori-teori pertumbuhan sebelumnya. Teori pertumbuhan endogen memberikan penekanan pada pentingnya variabel modal manusia (*human capital*) dan variabel penelitian dan pengembangan (*research and development = R&D*). Teori ini menyatakan bahwa akumulasi modal tetap memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi namun, dengan definisi yang lebih luas, yaitu dengan memasukkan unsur modal insani (*human capital*) ke dalam model.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan IPM serta mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia.

Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk investasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan memberikan gaji yang lebih tinggi kepada tenaga kerja bersangkutan.

Selain itu, perubahan teknologi merupakan bagian dari proses pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai faktor yang berasal dari luar model (*exogenous*) Lebih jelasnya, pada teoritis pertumbuhan endogen mencoba

menjelaskan faktor yang secara *eksogen* oleh persamaan pertumbuhan asik versi Solow (*Solow residual*).



Persamaan teori endogen dapat dituliskan dengan formulasi:

$$Y = AK$$

dimana Y adalah total output, K adalah persediaan modal (baik modal fisik maupun modal manusia), dan A adalah faktor teknologi. Model ini tidak menunjukkan adanya *diminishing marginal returns to capital investment* seperti yang nampak pada model Solow. Akibatnya, investasi pada modal fisik dan modal insani (salah satunya melalui sarana pendidikan).

malah akan meningkatkan produktivitas dari modal tersebut. Teori ini memandang bahwa teknologi ataupun ilmu pengetahuan dinilai mampu meningkatkan produktivitas per satuan input dan memperlambat bahkan menghentikan bekerjanya *law of diminishing returns*.

#### 2.1.4 Divergensi

Menurut Barro (2016) divergensi merupakan suatu kondisi dimana kesenjangan pendapatan semakin melebar dan menurut Kurniawan (2019) istilah konvergensi secara tradisional mengacu pada pelebaran “kesenjangan ekonomi” relative antar Negara atau wilayah, sependapat dengan itu Menurut Hasriati (2016) divergensi dalam statistik memiliki pengertian proses peningkatan dispersi dari sekelompok data lebih lanjut Maryaningsih (2014) Kondisi divergensi dapat diartikan sebagai kondisi saat tidak bertemunya antar daerah yang memberikan dampak kepada tingginya disparitas menurut Kazakova (2018) pertumbuhan ekonomi yang divergensi merupakan perekonomian daerah miskin tidak dapat mengurangi gap daerah kaya tiap tahunnya sehingga suatu daerah akan mencapai pertumbuhan ekonomi tidak menuju steady state. Ada penafsiran lain

ii konvergensi yaitu laju pertumbuhan (*rate of growth*) daerah miskin sama dengan daerah kaya. kondisi ini akan mengakibatkan daerah kaya



semakin kaya dan daerah miskin semakin miskin sehingga gap menjadi semakin besar (*divergensi*)

Menurut pandangan Barro (2015) mengenai konvergensi pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa suatu wilayah atau daerah tertinggal dapat mengejar ketertinggalan apabila pertumbuhan ekonominya mengalami konvergen atau dengan kata lain Ketika daerah tertinggal tumbuh lebih cepat daripada didaerah kaya namun, jika hal itu tidak terjadi suatu perekonomian terjadi divergensi pertumbuhan ekonomi. Perekonomian yang divergensi merupakan perekonomian daerah miskin dapat tidak dapat mengurangi gap pendapatan dengan wilayah atau daerah kaya tiap tahunnya, dalam jangka Panjang.

Berdasarkan teori konvergensi, pendapatan daerah yang terisolir akan tumbuh lebih cepat dari pendapatan didaerah yang lebih maju sehingga akhirnya tercapai konvergensi tingkat pendapatan di antara daerah yang bersangkutan. Sementara Quah (1996) menyebutkan bahwa yang terjadi adalah polarisasi distribusi pendapatan antarperekonomian di dunia. Lebih jauh menurut Pritchett masalah konvergensi justru telah memberikan kesan yang keliru oleh karena pembangunan ekonomi sebetulnya bukanlah sesuatu yang otomatis, atau mudah dalam hal ini , pertumbuhan ekonomi yang cepat bukanlah hasil dari keadaan miskin melainkan merupakan hasil dari serangkaian kebijakan yang diciptakan untuk memfasilitasi pertumbuhan yang cepat.

Sehingga berdasarkan pengertian dari beberapa pendapat ahli Secara umum divergensi yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah menjelaskan mengenai bagaimana perekonomian provinsi tertinggal tidak memiliki ngan untuk tumbuh lebih cepat dari provinsi maju.



Menurut teori kausalitas kumulatif dikemukakan oleh Myrdal Duranton (2015) Pembangunan di wilayah maju juga dapat menimbulkan dorongan yang justru mempercepat laju pembangunan wilayah tertinggal yang disebut *spread efek* yang seringkali berwujud penambahan dalam hal tingkat permintaan atas hasil produksi wilayah tertinggal ke wilayah maju Namun juga tidak sependapat dengan teori klasik Myrdal berpendapat bahwa dalam proses pembangunan terdapat beberapa faktor yang justru akan memperburuk tingkat perbedaan dalam pembangunan antar wilayah yang akan menyebabkan keadaan yang dapat menimbulkan hambatan dan gangguan lebih untuk wilayah tertinggal atau disebut efek *backwash efek* yang dimana disebabkan oleh perpindahan penduduk produktif dari wilayah tertinggal ke wilayah maju, kurangnya ketersediaan modal dikarenakan terpusat di wilayah lebih maju lebih menjamin pengembalian tinggi,serta juga pola perdagangan didominasi sektor -sektor di wilayah-wilayah lebih maju dan jaringan transportasi yang lebih baik di wilayah -wilayah maju sehingga kegiatan produksi lebih efisien dibandingkan wilayah tertinggal.

Menurut model pertumbuhan neoklasik Dalam Negara yang berkembang, pada saat proses pembangunan baru dimulai, tingkat perbedaan kemakmuran antarwilayah akan cenderung tinggi (divergence), Akan tetapi bila proses pembangunan terus berlanjut, dengan semakin baiknya prasarana dan fasilitas komunikasi, maka mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut akan semakin lancar. Dengan demikian, nantinya setelah negara yang bersangkutan telah maju, maka ketimpangan pembangunan akan berkurang (Convergence). Perkiraan ini



1 dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik wilayah provinsi tertinggal tumbuh  
 2at karena kondisi terus berlanjut dan banyak mendapat dukungan

(Ahmad, 2017).

Namun, Adanya heterogenitas dalam kinerja ekonomi diseluruh wilayah yang mempersulit distribusi pendapatan diseluruh negara yang mempersulit upaya konvergensi. Heterogenitas ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk perbedaan teknologi, kualitas kelembagaan, dan modal manusia yang menghambat kemampuan wilayah kurang mengejar ketertinggalan yang lebih maju.

Divergensi pertumbuhan ekonomi antarwilayah menjadi perhatian penting dalam wacana ekonomi kontemporer. Divergensi terjadi ketika wilayah dengan pendapatan yang awalnya lebih rendah gagal mengejar ketertinggalan dari wilayah yang lebih kaya, yang menyebabkan kesenjangan semakin lebar. Fenomena ini telah diamati dalam berbagai konteks, termasuk Jawa Timur, Indonesia, di mana penelitian terkini menunjukkan tingkat konvergensi yang rendah, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata dan bahkan dapat memperburuk kesenjangan yang ada (Sakti, 2022). Implikasi dari divergensi tersebut sangat besar, karena dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan inefisiensi ekonomi yang menyoroti perlunya strategi pertumbuhan yang seimbang yang mendorong pemerataan di samping pembangunan ekonomi (Februantika, 2023). Dalam mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan regional, penting untuk mempertimbangkan peran kebijakan ekonomi nasional dan struktur tata kelola daerah. Misalnya, di Inggris, hubungan antara pertumbuhan ekonomi nasional dan kesenjangan spasial telah diteliti, yang mengungkapkan bahwa kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan dapat secara tidak sengaja memperkuat kesenjangan regional (Pike, 2012). Pengamatan ini sejalan dengan temuan dari [redacted], di mana pembangunan ekonomi di tingkat nasional telah disertai dengan



peningkatan divergensi teritorial, terutama setelah krisis ekonomi (Zsibók, 2018). Pola-pola tersebut menggarisbawahi kompleksitas pengelolaan kesenjangan regional, karena kebijakan yang ditujukan untuk merangsang pertumbuhan di wilayah maju dapat semakin meminggirkan wilayah tertinggal. Dinamika ini khususnya terlihat di negara-negara seperti Tiongkok, di mana kesenjangan dalam sumber daya pendidikan telah berkontribusi pada pelebaran kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Wu, 2008). Lebih jauh, interaksi antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi telah dipelajari secara ekstensif, dengan hasil yang beragam yang menunjukkan bahwa sementara beberapa wilayah mungkin mengalami pertumbuhan, manfaatnya sering kali tidak terdistribusi secara merata, yang mengarah pada peningkatan kesenjangan (Okon, 2020; Nayak, 2021). Konsep kurva Kuznets Sebagai kesimpulan, divergensi pertumbuhan ekonomi antar daerah merupakan masalah yang memiliki banyak sisi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan nasional, disparitas pendidikan, dan kompleksitas inheren pembangunan ekonomi. Mengatasi disparitas ini memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan karakteristik unik setiap daerah dan mendorong strategi pertumbuhan yang adil. Seperti pada penelitian Kisiala (2017) peningkatan pertumbuhan disuatu negara dapat meningkatkan ketimpangan hal tersebut mengisyaratkan dorongan pertumbuhan dari ekonomi yang maju dapat menyebabkan efek samping negative di wilayah yang kurang maju karena terkurasnya tenaga kerja dan modal diwilayah kurang maju.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat negara atau regional, prediksi teori kesenjangan adalah selisih antara negara kaya dan negara miskin terus meningkat disebabkan karena negara sedang



berkembang sangat sulit untuk meningkatkan pendapatan karena adanya ledakan pertumbuhan penduduk masing-masing regional dan secara nasional.

### **2.1.5 Infrastruktur terhadap divergensi pertumbuhan ekonomi**

Pada bidang ekonomi, jika kondisi infrastruktur suatu wilayah terbatas dan tidak berkualitas maka wilayah tersebut tergolong tertinggal dan terbalakang. Amalia (2019) menyatakan bahwa infrastruktur memberikan dampak terhadap perekonomian melalui dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Dampak langsung adalah meningkatnya output seiring bertambahnya infrastruktur, sedangkan dampak tidak langsungnya adalah aktivitas perekonomian naik, secara bersamaan meningkatkan modal baik pihak swasta maupun pemerintah serta dapat menyerap tenaga kerja yang berakibatkan pada kenaikan output. Infrastruktur yang baik juga meningkatkan produktivitas dengan mengurangi biaya produksi.

Pembangunan infrastruktur di beberapa literatur dianggap sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, namun banyak bukti bahwa pembangunan infrastruktur juga tidak berdampak pada konvergensi ekonomi koetter (2008) berpendapat bahwa meskipun penyediaan barang publik pemerintah pada umumnya diharapkan untuk melengkapi investasi swasta, dalam konteks regional tertentu infrastruktur yang lebih baik dapat mengurangi biaya transportasi sehingga aktivitas bergeser dari daerah berkembang ke daerah yang maju sehingga memperburuk keseimbangan regional pergeseran ini dapat menyebabkan situasi dimana daerah yang infrastruktur yang lebih baik mengalami percepatan pertumbuhan, sementara infrastruktur yang tidak memadai tertinggal

menghambat konvergensi secara keseluruhan lebih lanjut Apurv (2020) emukan hubungan negatif antara investasi infrastruktur transportasi dan



pertumbuhan ekonomi dikarenakan infrastruktur direncanakan dengan buruk atau berlebihan dapat menyebabkan inefisiensi yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Maculyte (2022) di wilayah-wilayah yang struktur ekonominya tidak mendukung pemanfaatan infrastruktur baru, investasi mungkin tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam kerangka teori neoklasik Bekele (2015) tidak adanya infrastruktur yang memadai dapat menyebabkan inefisiensi dalam pemanfaatan tenaga kerja dan modal yang mengakibatkan tingkat produktivitas yang lebih rendah terbukti pada penelitian Yu (2021) yang menemukan bahwa infrastruktur publik memengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang menekankan bahwa wilayah dengan infrastruktur yang lebih baik cenderung mengalami produktivitas yang lebih tinggi sebaliknya infrastruktur yang buruk kesulitan mengoptimalkan kapasitas produksinya yang berujung stagnasi atau divergensi hal yang sama vijverberg (2011) kualitas infrastruktur merupakan penentu kinerja ekonomi, karena infrastruktur yang buruk dapat membatasi akses pasar, meningkatkan biaya transportasi dan mengurangi efisiensi secara keseluruhan dan juga wichman tanpa infrastruktur yang tepat, potensi output tenaga kerja dan modal berkurang

Dalam ilmu ekonomi, infrastruktur merupakan wujud modal publik (*public capital*) dalam bentuk investasi pemerintah (Mankiw, 2018) dalam model pertumbuhan ekonomi solow pentingnya akumulasi modal fisik menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur, seperti transportasi, jalan, komunikasi, sanitasi dan energi tidak dapat dipisahkan dari laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara maupun daerah hal tersebut menyebabkan



lun infrastruktur menjadi fondasi pembangunan ekonomi utan. Pertambahan dan perbaikan infrastruktur oleh pemerintah

diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi.

Maryaningsh (2014) Infrastruktur berperan penting dalam mengurangi kesenjangan wilayah dan dampak panjangnya bagi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan ketersediaan infrastruktur yang mencukupi dalam penelitiannya bahwa disparitas ketersediaan capital fisik dan human capital berperan dalam menjelaskan adanya perbedaan pertumbuhan antar negara.

### 2.1.6 Investasi terhadap divergensi pertumbuhan ekonomi

Roy Harrod dan Evsey Domar yang merupakan ahli ekonom mengembangkan teorinya yang lebih dikenal sebagai teori Harrod-Domar, dimana di dalam teori Harrod-Domar yang menjelaskan mengenai investasi yang beranggapan bahwa investasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam perekonomian, dimana dengan adanya investasi, maka akan meningkatkan kapasitas modal dan akan meningkatkan kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa dan dengan bertambahnya kapasitas barang modal, maka permintaan agregat juga haruslah bertambah, Hal tersebut menuntut adanya investasi untuk menambah kemampuan dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Dengan demikian, untuk menjamin suatu pertumbuhan ekonomi yang teguh, maka investasi harus terus-menerus mengalami penambahan dari tahun ke tahun (Sukirno, 2016).

Pembentukan modal ini dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan kebutuhan seluruh masyarakat. Dengan demikian, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh, maka investasi harus mengalami

dari tahun ke tahun (Sukirno, 2016). Teori ini didukung dengan hasil oleh Dharma (2015), dimana investasi menunjukkan nilai positif dan



berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berarti dengan adanya peningkatan investasi, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Peranan investasi, baik investasi pemerintah maupun investasi swasta sangat penting dalam pembangunan ekonomi, karena kegiatan investasi tidak hanya atau meningkatkan permintaan agregat tetapi juga akan meningkatkan pemasaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi (Helen 2018). Dengan meningkatnya kapasitas produksi, Produktivitas juga akan meningkat sehingga dalam perspektif waktu yang lebih panjang investasi akan meningkatkan capital stock, dimana setiap penambahan stock capital akan meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output yang pada gilirannya akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto.

Temuan Arsyanti (2020) dimana variabel PMTB berpengaruh positif dikarenakan kegiatan investasi akan menambah stok modal yang selanjutnya akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi berlawanan hasil dengan temuan Bayar (2014) dalam penelitiannya tidak semua bentuk investasi berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini dikarenakan efisiensi investasi itu sendiri dan penelitian Bakari (2018) yang menunjukkan bahwa investasi domestik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aljazair.

### **2.1.7 Hubungan TPAK terhadap divergensi pertumbuhan ekonomi**

Dalam teori Adam Smith yang membahas mengenai alokasi sumber daya manusia, dimana Adam Smith menganggap bahwa manusia merupakan faktor yang paling utama yang dapat menentukan kemakmuran suatu wilayah, dan tanpa adanya sumber daya manusia maka input-input produksi yang



lain tidak akan terolah dengan baik pada dasarnya sumber daya manusia ialah sebagai tenaga kerja untuk menghasilkan barang ataupun jasa dalam perekonomian dan model pertumbuhan Solow dalam mendefinisikan pertumbuhan output dipengaruhi oleh persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja dan kemajuan teknologi.

Pembangunan ekonomi atau output nasional dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang berperan sebagai tenaga kerja. Jadi semakin banyak tenaga kerja, tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah semakin besar. Sejalan dengan itu, Simanjuntak (2000) menyatakan bahwa Tingkat Patisipasi Angkatan Kerja juga dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi. Sehingga semakin bertambah kegiatan ekonomi, semakin besar Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan semakin tinggi angka partisipasi Angkatan kerja maka ketersediaan tenaga kerja meningkat dan siap produktif memproduksi barang dan jasa dengan meningkatkan produktivitas akan mendingir pertumbuhan.

Peningkatan jumlah tenaga kerja yang produktif dapat memberikan kontribusi pada meningkatnya output perekonomian (Hartati, 2021). Kontribusi penduduk usia kerja dalam perekonomian dapat diukur melalui Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK). TPAK merupakan indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan sejauh mana penduduk usia kerja berpartisipasi dalam perekonomian suatu wilayah (Badan Pusat Statistik, 2020)

Begitupun Penggunaan model pertumbuhan Solow dalam mendefinisikan pertumbuhan output dipengaruhi oleh persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja dan kemajuan teknologi (Mankiw, 2018). Dimana pertumbuhan ekonomi

angka pendek dapat dicapai dengan adanya peningkatan efisiensi pada an input kapital dan tenaga kerja.



Todara (2020) menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan kerja atau jumlah penduduk yang lebih besar akan menambah Angkatan kerja. Dimana jumlah Angkatan kerja yang lebih besar akan menambah tingkat produksi karena produktivitasnya juga meningkat serta penduduk yang lebih besar akan mengubah ukuran pasar domestik yang menjadi lebih besar. Dengan kata lain, semakin banyak masyarakat yang produktif, maka akan menghasilkan output tinggi pula.

Irawan (2024) efek positif dari tingkat partisipasi Angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi di Provinsi Bali yang dimana bahwa tenaga kerja yang aktif dan terlibat memberikan efek positif terhadap pembangunan ekonomi dan juga Apire (2023) menyoroti bahwa partisipasi Angkatan kerja pendorong penting dalam pertumbuhan output yang pentingnya memaksimalkan keterlibatan tenaga kerja di semua demografi. Sementara penelitian Nadilla (2023) menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi tidak serta merta mengarah pada peningkatan kinerja perekonomian di semua wilayah atau sektor dan dalam penelitian Taha (2023) di beberapa negara Arab, tidak ada hubungan signifikan antara partisipasi angkatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang memperkuat gagasan bahwa partisipasi Angkatan kerja tidak mendorong konvergensi pertumbuhan ekonomi.

Darzal (2016) naiknya partisipasi angkatan kerja atau produktivitas, maka akan mendorong bertambahnya output, dalam hal ini output diartikan sebagai pendapatan perkapita yang diterima oleh angkatan kerja tersebut. Semakin besar pendapatan atau upah yang didapatkan, maka semakin besar kemampuan

cat tersebut untuk melakukan konsumsi, sehingga akan mendorong tan laju pertumbuhan.



Apabila semakin banyak angkatan kerja yang berpartisipasi dalam sektor ekonomi maka laju pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan sebaliknya, Apabila produktivitas tenaga kerja mengalami penurunan maka kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output tidak akan terserap oleh sektor ekonomi. Nilai tambah produksi yang menurun sebelumnya akan berimbas pada efektivitas yang lebih kepada tenaga kerja yang sudah ada, sehingga lapangan kerja tidak dibuka. Hal tersebut akan mengganggu perekonomian karena akan mengakibatkan pengangguran besar- besaran.

### **2.1.8 Hubungan IPM terhadap divergensi pertumbuhan ekonomi**

Para tokoh seperti Adam Smith, John Stuart Mill dan Alfred Marshal menyatakan kemampuan individu merupakan sumber utama kekayaan dan kemajuan ekonomi yang mendorong inovasi dan meningkatkan metode produksi melalui pengembangan akumulasi pengetahuan dan pengembangan teknologi baru (Berry, 2018 dan Igwe, 2023) kemudian dikembangkan lebih luas Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Menurut Mankiw (2018) Seperti halnya dengan modal fisik, modal manusia meningkatkan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Untuk meningkatkan level modal manusia dibutuhkan investasi dalam bentuk guru, perpustakaan dan waktu belajar.

Todaro (2020) mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta



pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Todaro dan Smith (2020), Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara, yang mengombinasikan pencapaian dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan pendapatan rill per kapita yang disesuaikan. Kualitas sumber daya manusia mampu kontribusi terhadap produktivitas, sehingga mendorong pertumbuhan perekonomian. Hubungan antara pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi, menggambarkan mutu sumber daya manusia semakin meningkat. Peningkatan mutu sumber daya manusia semakin baiknya keterampilan, keilmuan, teknologi dan kesehatan dapat menumbuhkan produktivitas

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengetahui pembangunan ekonomi yang mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk, yaitu Kesehatan, tingkat Pendidikan dan indikator ekonomi. Oleh sebab itu, manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan non fisik mengandung makna sebagai peningkatan kemampuan dasar penduduk. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai saran penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.

Jika skor IPM yang didapatkan suatu wilayah itu bertambah tinggi maka dapat diartikan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah tersebut yang diukur melalui komponen dimensi daya beli (pendapatan), dan Kesehatan masyarakat. Sebaliknya apabila skor IPM yang an oleh suatu wilayah bertambah rendah ,maka bertambah rendah pula



tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah tersebut( Purba, 2021) Pendidikan dan Kesehatan memainkan peranan yang besar untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi.

Elistia (2018) menemukan bahwa IPM memiliki hubungan positif yang kuat dengan produk domestik bruto (PDB) yang menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan Pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat dan juga Yewati (2023) kualitas sumber daya manusia sebagaimana diukur dengan IPM, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga, perlunya memprioritaskan Pembangunan manusia yang dapat menghasilkan hasil ekonomi yang baik dalam jangka Panjang. berbeda dengan itu penelitian sebelumnya Irawan (2024) yang dimana IPM tidak berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Bali pada penelitian Sumarsono (2022) temuan tidak terduga IPM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia hal ini disebabkan perlambatan pertumbuhan IPM sejak pandemic COVID 2019 dan juga pada penelitian Raj (2024) menemukan bahwa tidak ada bukti suatu daerah yang secara ekonomi lemah dan HDI rendah mengejar ketertinggalanya dari negara yang secara ekonomi kaya dan HDI tinggi.

## 2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian dan juga dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.



melakukan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dengan penelitian ini antara lain:

Penelitian yang dilakukan Leonard (2020) *origins of regional divergence :economic growth in socialist Yugoslavia* yaitu menganalisis pola pertumbuhan dan divergensi regional di Yugoslavia menemukan penyebab divergensi pertumbuhan ekonomi di Yugoslavia yang pertama adalah sumber pertumbuhan di seluruh wilayah berbeda-beda yang kedua kegagalan wilayah kurang berkembang mencapai tingkat ketenagakerjaan yang kurang maju.

Penelitian yang dilakukan Lee (2005) *Income Disparity between Japan and ASEAN- 5 Economies: Converge, Catching Up or Diverge?* yaitu menguji secara empiris perbedaan pendapatan antara Jepang dan masing-masing dari lima negara besar di ASEAN selama periode 1960-1997 dengan hasil negara yang dapat berkonvergensi terhadap negara Jepang yaitu hanya negara Singapura sementara negara ASEAN lainnya menunjukkan pola yang memperlebar ketimpangan terhadap negara Jepang.

Selanjutnya pengelompokan tiap-tiap provinsi pada penelitian Arsyanti (2020) mengenai Analisis konvergensi ekonomi pada level kawasan dan nasional serta faktor-faktor yang memengaruhinya yang bertujuan memberikan gambaran perekonomian dan menganalisis terjadinya konvergensi ekonomi pada level KBI, KTI dan nasional Analisis dilakukan dengan regresi data panel pada level KBI (17 provinsi), KTI (16 provinsi), dan Nasional (33 provinsi) selama tahun 2011-2018. Hasil yang diperoleh bahwa perekonomian di KBI dan KTI masih timpang. Tingkat dispersi pendapatan perkapita dari tahun 2011- 2018 mengalami perbaikan atau terjadi konvergensi sigma pada level KTI dan Nasional, sedangkan KBI tidak. Selanjutnya, melalui analisis regresi data panel diperoleh konvergensi

mutlak dan kondisional terjadi pada level KBI, KTI, maupun Nasional. Koefisien beta kondisional yang didapat menunjukkan bahwa variabel yang



merepresentasikan faktor-faktor produksi mampu mempercepat laju konvergensi. variabel yang memengaruhi pertumbuhan pendapatan dan proses konvergensi pada level Nasional yaitu panjang jalan, PMTDB, proporsi angkatan kerja yang bekerja, dan rata-rata lama sekolah; pada level KBI yaitu panjang jalan, PMTDB, dan proporsi angkatan kerja yang bekerja; sedangkan pada level KTI yaitu panjang jalan dan rata-rata lama sekolah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh irawan (2024) *The Impact of Human Development Index, Minimum Wage, Labor Force Participation Rate, and Open Unemployment Rate on Economic Growth* yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi faktor -faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi bali dengan variabel dependen pertumbuhan ekonomi dan variabel independennya indeks pembangunan manusia, upah minimum provinsi, tingkat partisipasi Angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum provinsi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sebaliknya, variabel tingkat partisipasi Angkatan kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, variabel indeks pembangunan manusia tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dan bernilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Nadilla (2023) *The effect of inflation, labor force participation rate and exports on economic growth in Indonesia* yang mengkaji pengaruh inflasi, tingkat partisipasi Angkatan kerja dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan model autoregressive distribusi lag dengan data time series 1990-2021, hasil penelitian



menunjukkan inflasi berpengaruh negative dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tingkat partisipasi Angkatan kerja tidak berpengaruh

signifikan namun positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan ekspor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan Bayar (2014) dengan judul *Effects of foreign direct investment inflows and domestic investment on economic growth: Evidence from Turkey* yang bertujuan memeriksa kemungkinan dampak arus investasi langsung dan investasi domestik di Turki selama periode 1980-2012 dengan menggunakan uji kointegrasi yang menunjukkan bahwa arus investasi langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negative dalam jangka Panjang dan pendek sementara investasi domestik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dalam jangka Panjang atau jangka pendek.

Penelitian Asnawi (2023) *The Effect Of Foreign Debt, Foreign Investment (Fdi), And Government Spending On Economic Growth In 5 Asean Countries* yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh utang luar negeri, penanaman modal asing dan pengeluaran pemerintah di 5 negara ASEAN, menggunakan metode regresi data panel dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa utang luar negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi , penanaman modal asing tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi serta belanja pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

